

**PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya Pada Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**MEI LINDA**

**NPM : 165320245**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Alamat: JL. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan

Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

NAMA : Mei Linda  
NPM : 165320245  
JURUSAN : Diploma III Akuntansi  
FAKULTAS : Ekonomi  
JUDUL : Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Riau

Disetujui oleh:

**Pembimbing**

**Ketua Prodi**

  
**Emkhad Arief, SE., M.SI., Ak., CA**

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., AK., CA**

**Dekan**

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau**

  
**Drs. H Abrar, M.si., AK., CA**

## PERNYATAAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Laporan PKL ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Ahli Madya (A.Md), dengan baik pada Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Saya yang membuat pernyataan ini,



(Mei Linda)

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan yang Maha Kuasa dan berkat ridho dan Karunia –Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan yang berjudul Analisis Perencanaan Anggaran pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Laporan praktek kerja lapangan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa laporan praktek kerja lapangan ini jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi kesempurnaan laporan ini dan penyusunan selanjutnya memiliki hubungan dengan laporan ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta. Dan yang tidak pernah terlupakan ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Bapak **Drs.Abrar.M.si.,Ak**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

2. Bapak **Firdaus AR,S.E.M.si,Ak**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu **Dina Hidayat,SE.,M.Si,Ak.,CA** selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Emkhad Arif,SE.,M.Si., Ak.,CA** selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan, bimbingan dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi penulis selama menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi dengan baik.
6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah ikut membantu proses belajar mengajar di kampus
7. Buat **Hengky Putra Kristian** selaku teman special yang telah membantu dan memberikan dukungan serta memotivasi penulis sehingga lebih bersemangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Buat sahabat yang saya sayangi yaitu **Tria Putri Pangaribuan**, terima kasih banyak sudah membantu, selalu ada disaat susah maupun senang, yang tidak pernah meninggalkan, selalu support dalam keadaan apapun,

karna bersama ialah saya bisa maju sampai menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Untuk Pimpinan tempat magang yang telah memberi bantuan selama penulis melaksanakan magang di kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.
10. Untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Praktek kerja Lapangan ini tidak dapat di sebut kan satu persatu,saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semoga dukungan, bantuan serta do'a yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Semoga laporan praktek ini berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis, Mei linda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Tujuan Dan Manfaat Kegiatan .....	4
C. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU .....</b>	<b>7</b>
A. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.....	7
B. Struktur Organisasi Kantor .....	18
C. Bagian/Unit Kerja dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau .....	10
D. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Kementerian Agama Kementerian Agama Prov. Riau.....	12
<b>BAB III: PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU .....</b>	<b>14</b>
A. Tujuan Penyusunan Anggaran.....	14

B. Sumber Dana .....	14
C. Jenis Anggaran .....	14
D. Proses Penyusunan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau.....	14
E. Revisi Penyusunan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau.....	16
<b>BAB IV   ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR           WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teori .....	17
1. Pengertian Anggaran	
2. Fungsi Anggaran	
3. Faktor Penghambat Penyusunan Anggaran	
4. Siklus Penyusunan Anggaran	
B. Analisis Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementrian Wilayah Provinsi Riau .....	26
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi .....10

Gambar IV.1 Siklus APBN .....28



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 .....	32
Lampiran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 .....	33
Lampiran Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 .....	34



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam UU No 17 tahun 2003 pasal 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan.

Keuangan Negara sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

- Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar utang pihak ketiga
- Penerimaan Negara
- Pengeluaran Negara
- Penerimaan daerah
- Pengeluaran daerah

–Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang di nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan/ perusahaan daerah.

Adapun anggaran digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi dalam dimensi kuantitatif dan waktu serta sebagai rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai alat perencanaan, Anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan di perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang.

Pemerintah daerah pada umumnya membuat anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasinya, karakteristik tujuan anggaran diharapkan dapat menjadi factor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja individu pada instansi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.

Kementrian agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementrian Agama kota Pekanbaru lebih banyak menitik beratkan pada pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama.

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan sistem pada perencanaan dan keuangan Kementrian Agama. Kementrian agama sebagai sub sistem

pemerintahan Republik Indonesia tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya kementerian agama Kota Pekanbaru lebih banyak menitik beratkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks, perlu terus di tingkatkan kualitas kinerja pelanan masyarakat.

Pada bagian perencanaan, Pelaporan dan keuangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, verifikasi dan akuntansi serta pelaksanaan anggaran sekretariat daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Perencanaan keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara perencanaan, pelaporan, verifikasi dan akuntansi serta pelaksanaan anggaran sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan. Kemudian menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan anggaran sekretariat daerah serta koordinasi urusan pemerintahan.

Dalam bagian perencanaan dan anggaran keuangan terdapat struktur organisasi seperti di mulai dari Kepala Bagian (Kasubag), kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan, kepala sub verifikasi dan akuntansi, serta kepala sub bagian pelaksanaan.

Tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan Kantor kementerian agama Provinsi Riau adalah melaksanakan berbagai tugas sekretarian di

bidang penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk kelancaran aktivitas kerja tersebut maka harus di dukung sarana dan prasarana kantor yang menunjang.

Berdasarkan program magang yang di lakukan penulis selama PKL dalam waktu 1 bulan 20 hari pada bagian perencanaan dan keuangan kantor wilayah kementerian Provinsi Riau terdapat beberapa masalah seperti adanya kesalahan dalam mengatur uang keluar seperti pembelian aset kantor, menginput data Satuan Kerja dari setiap sekolah Muslim seperti Madrasah di Provinsi Riau, dan tata ruang sub bagian perencanaan dan keuangan kantor wilayah kementerian agama Provinsi Riau yang memiliki vasilitas yang kurang cukup menunjang pegawai untuk bekerja lebih maksimal.

Oleh sebab itu, dari latar belakang di atas penulis akan mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU”**

## **B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

### **1. Tujuan Kegiatan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan kegiatan sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Penyusunan Anggaran pada kantor Kementerian Agama Provinsi Riau

- b. Menambah pengetahuan, wawasan , pengalaman dan kemampuan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja.
- c. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktik PKL, yakni pada ***Sub Bagian Perencanaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Riau***
- d. Melatih kedisiplinan dan kerja sama dalam melaksanakan tugas agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.

## **2. Manfaat Kegiatan**

Adapun kegiatan yang telah dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat;

- a. Menjadi lebih mengetahui bagaimana proses mengatur Perencanaan dan anggaran keuangan pada kantor wilayah kementerian agama
- b. Menjadi lebih mengetahui bagaimana mengatur setiap Kas keluar dan Kas masuk yang di peroleh dan di keluarkan

## **C. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari Laporan mengenai perencanaan dan anggaran keuangan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi riau, sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan pokok permasalahan secara umum mengenai latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan praktek kerja lapangan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini adalah bab yang Menjelaskan tentang gambaran umum kantor Kementerian Agama Provinsi Riau meliputi sejarah singkat, Struktur organisasi serta visi,misi dan tujuannya.

**BAB III : PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau

**BAB IV : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Landasan teori mengenai anggaran.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran tentang masalah-masalah yang terjadi pada bagian perencanaan anggaran keuangan kantor kemenag Prov.Riau



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR

#### WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

##### A. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Saat ini dipimpin oleh Pgs Kakanwil **Drs. H. Mahyudin MA** yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang agama dan keagamaan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

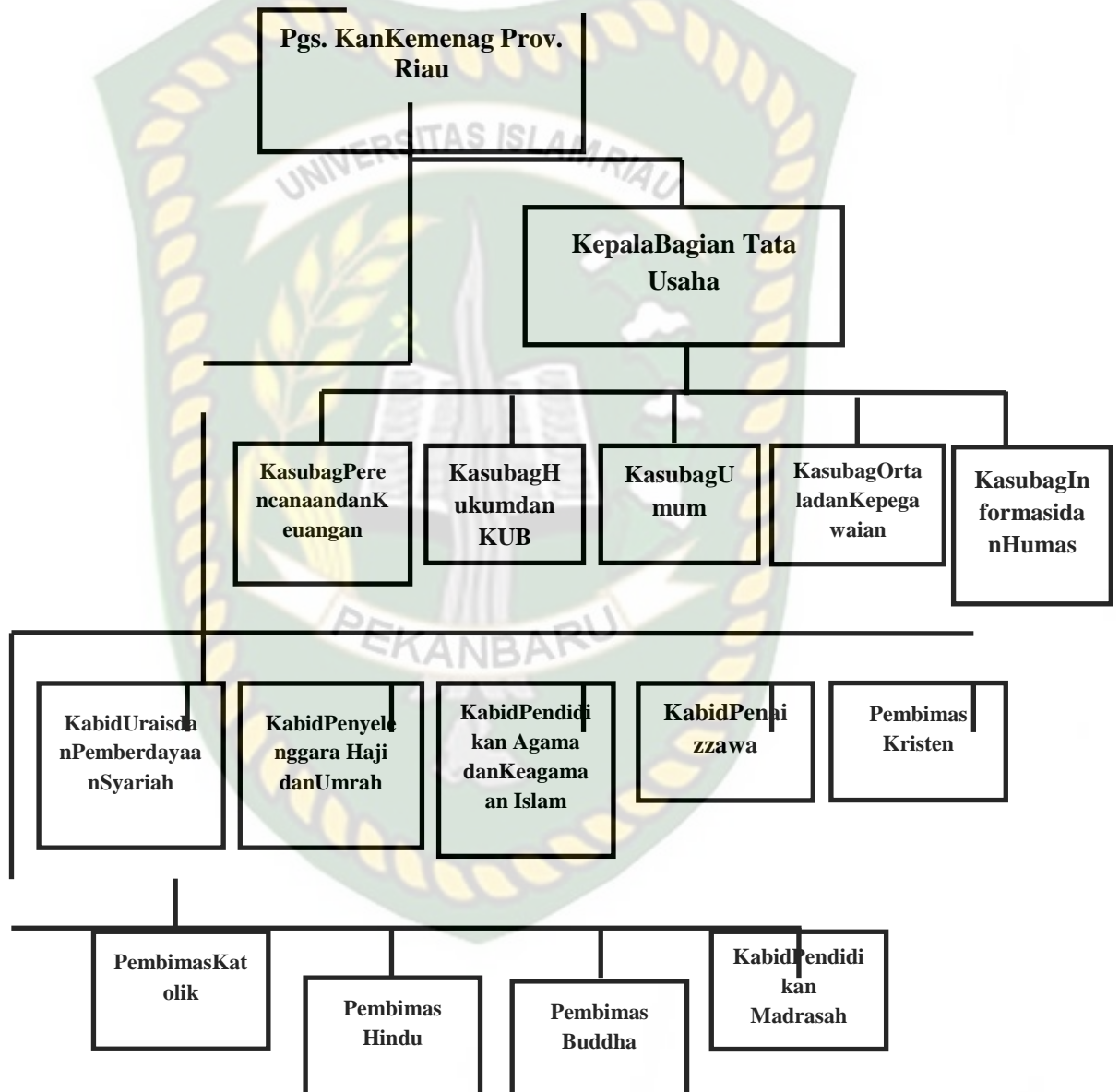
## **B. Struktur Organisasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau**

Untuk menjalankan kegiatan perusahaan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta untuk mengaktifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan manajemen perusahaan. Adapun struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Prov. Riau terdiri dari :

- PSG. Kakanwil Kemenag Prov. Riau
- Kabag Tata Usaha
- Kabid urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam\
- Kabid Pendidikan Madrasah
- Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
- Pembimas Kristen
- Pembimas Katolik
- Pembimas Hindu
- Pembimas Buddha

## STRUKTUR ORGANISASI KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

Gambar II.1



Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2018

### **C. Bagian / Unit Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.**

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh **HM. Saman., S. Sos,** Mmempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan serta pembinaan administrasi keuangan dan BMN di lingkungan kantor kementerian Agama Provinsi Riau

#### **2. Bidang Pendidikan Madrasah**

Bidang Pendidikan Madrasah yang dipimpin oleh **H Ilyas, M. Ag** mempunyai tugas dalam pelanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada sekolah madrasah dan pada pendidikan islam pada sekolah-sekolah umum dan sekolah luar biasa. Tugas telah di atur berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala Kankemenag.

#### **3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam**

Bidang Pendidikan Agama dipimpin oleh **Drs. H. Ruslah. M.Pd.I** mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan serta mengelola sistem informasi pada bidang pendidikan

agama berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala kantor kemenag.

#### **4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki tugas sebagai pelaksana pelanaan dan bimbingan di bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, serta penyiapan bahan pelayanan bimbingan d bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah

#### **5. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf**

Bidang ini di pimpin oleh Drs. H Irhas mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta penyelenggaraan pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid. Pelaksanaan ebijakan teknis di bidang pendidikan Al-Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, Siaran dan Tamaddun Publikasi dakwah dan hari besar islam berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala kantor kemenag.

#### **6. Pembimbing Masyarakat Kristen**

Pembimbing Masyarakat Kristen dipimpin oleh Yesri Elvis Hasugian, STh mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat kristen berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala kantor kemenag.

### **7. Pembimbing Masyarakat Katolik**

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

### **8. Pembimbing Masyarakat Hindu**

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

### **9. Pembimbing Masyarakat Budha**

Pembimbing Masyarakat Budha yang dipimpin oleh **Tarjoko S. Ag** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

## **D. Visi, Misi dan Tujuan Utama dari Kantor Kementrian Agama**

### **Provinsi Riau**

Untuk mencapai tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah menetapkan Visi dan Misi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 113 Tahun 2005

tentang Penetapan Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian diperbaharui pada tahun 2009.

#### **Visi**

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.

#### **Misi**

1. Mewujudkan Masyarakat yang Taat Menjalankan Ajaran Agamanya,
2. Meningkatkan Tatanan Masyarakat yang Rukun dan Toleran,
3. Meningkatkan Mutu dan Memperluas Akses Pendidikan Madrasah, Pendidikan, Agama, dan Pendidikan Keagamaan yang Handal dan Kooperatif,
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat,
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

#### **Tujuan:**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan inter umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

##### **A. Tujuan Penyusunan Anggaran**

Penyusunan anggaran dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan.

##### **B. Sumber Dana Anggaran**

Sumber dana untuk anggaran kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Riau di peroleh melalui APBN. Sumber APBN sebagian besar di peroleh dari pajak, hibah dan utang luar negeri.

##### **C. Jenis Anggaran**

Pada kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Riau tidak memiliki jenis anggaran karena Kanwil hanya bersifat melaksanakan kegiatan anggaran.

##### **D. Proses Penyusunan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau**



Berikut ini akan dijelaskan proses penyusunan anggaran yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagai berikut :

Di pusat dilakukan musyawarah perencanaan nasional atau biasa yang di sebut Musrenas pada periode bulan Febuari-Maret, kemudian hasil musrenas tersebut disampaikan lah kepada menteri keuangan mengenai sasaran kementerian untuk tahun berikutnya, kemudian kanwil membawa hasil tersebut ke pusat daerah dan mengumumkan sasaran berupa kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian masing-masing kepala satuan kerja ( terdiri dari 78 satuan kerja ) membentuk kelompok yang disebut dengan Raker ( Rapat Kerja ).

Kepala kanwil kemudian akan mengadakan Raker serta mengumumkan mengenai hasil arahan dari pusat, setelah mengumumkan arahan tersebut pada setiap kelompok Satker akan mulai mengusulkan kegiatan yang kira-kira akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Setiap anggota satker akan mengikuti siklus anggaran dan dari siklus tersebut akan menghasilkan anggaran dari pusat, apabila anggaran telah disahkan, usulan dari kanwil dan usulan dari pusat akan di bandingkan, alasan dilakukan hal tersebut dikarenakan pengusulan antara pusat dengan kanwil berbeda, kanwil mengusulkan banyak kegiatan namun kegiatan yang di akomodir hanya beberapa kegiatan.

Ketika hasil telah di setuju akan ditetapkan pada bulan November. Namun usulan tersebut belum tentu dapat diterima sepenuhnya oleh pemerintah karena setiap bulannya akan terdapat perubahan penerimaan

kegiatan yang diusulkan, seperti pada bulan Mei kanwil mengusulkan pembangunan sekolah sebanyak 100 unit dan diterima pemerintah, namun pada bulan selanjutnya yaitu bulan agustus pemerintahan dapat mengubah menjadi hanya menerima pembangunan RKB sebanyak 50 unit dan hasil akhir penerimaan pembangunan akan berakhir pada bulan november. Selanjutnya terakhir setelah pengesahan perencanaan pembangunan telah disetujui, pada bulan desember akan dilakukan pengesahan DIPA dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

#### **E. Revisi Penyusunan Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau**

Revisi penyusunan anggaran pada kantor wilayah kementerian agama Provinsi Riau dilakukan apabila adanya perubahan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan APBN. Revisi dapat terjadi dikarenakan anggaran yang akan dilaksanakan tidak sama dengan anggaran yang telah disahkan dalam dokumen RKA-KL,DIPA dan POK.

## BAB IV

### ANALISIS PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan, terdapat juga beberapa definisi anggaran yaitu :

*Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. (Sugijanto dkk, 1995:22 )*

*Anggaran merupakan sebagian paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang di harapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang, ( Bastian, 2006:163 )*

Dari dua definisi anggaran diatas dapat kita cermati bahwa anggaran adalah nuntuk periode tertentu dimasa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa anggaran disusun atau hanya menggambarkan kondisi yang akan dicapai di masa mendatang selama periode tertentu. Sehingga persamaan dari dua definisi penganggaran diatas adalah bahwa anggaran harus di nyatakan dalam

ukuran finansial, sehingga rencana kegiatan atau kinerja atau perkiraan berupa nonfinansial tidak termasuk dalam anggaran.

## **2. Fungsi Anggaran**

Anggaran dalam akuntansi berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2009) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut :

### **1. Anggaran sebagai alat Perencanaan**

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang di peroleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang alternatif pembiayaannya
- Mengalokasi kan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

### **2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian**

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat digunakan untuk empat cara, yaitu :

- Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- Menghitung selisih anggaran
- Menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
- Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

### 3. Anggaran sebagai alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintahan, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

### 4. Anggaran sebagai alat penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran

yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

### **3. Faktor Penghambat Penyusunan Anggaran**

Dalam proses penyusunan anggaran terdapat beberapa hal penghambat mengakibatkan kurangnya dana anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Berikut beberapa faktor penghambat penyusunan anggaran yaitu sebagai berikut :

#### **1. Perubahan Kurs Rupiah ( Nilai Tukar Rupiah )**

Kurs rupiah adalah pertukaran antara harga dua mata uang yang berbeda, seperti harga mata uang indonesia yang dapat ditukarkan dengan mata uang asing. Namun kurs rupiah dapat berubah setiap saat dan dapat mengalami kenaikan maupun penurunan terhadap mata uang negara lain.

Salah satu hal pada kurs rupiah yang menghambat penganggaran yakni ketika nilai rupiah melemah dan pendapatan mengalami kenaikan namun pengeluaran terus terjadi sehingga terjadi pembengkakan.

#### **2. Inflasi**

Inflasi merupakan meningkatnya harga-harga secara terus menerus yang disebabkan oleh berbagai hal seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihan liquiditas, serta tidak seimbangnya kebutuhan masyarakat dengan persediaan yang ada di pasar.

Salah satu kejadian inflasi yang menghambat perencanaan anggaran yakni naiknya kenaikan satu harga barang yang diikuti dengan kenaikan harga barang lainnya yang akan memicu laju naiknya inflasi sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi serta terhambatnya perencanaan anggaran pembangunan nasional dan mempengaruhi struktur APBD yang telah di tetapkan pada awal tahun.

### 3. Lifting Minyak

Lifting migas merupakan produksi minyak bumi dan gas yang akan dijual sehingga besarnya lifting akan berpengaruh terhadap produksi, dikarenakan tidak semua migas yang baru keluar dari bumi dapat di jual sehingga untuk menjadi lifting migas harus di angkut dan di proses terlebih dahulu.

Apabila penjualan lifting migas menurun hal tersebut akan berpengaruh dalam turunya penerimaan negara.

### 4. Ekspor dan Impor

Ekspor merupakan proses penjualan barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga memperoleh pendapatan. Sedangkan impor merupakan proses pembelian barang atau jasa dari satu negara ke negara lain.

Salah satu pengaruh ekspor impor terhadap pembangunan anggaran adalah apabila ekspor menurun, pendapatan negara akan menurun sehingga terjadi kurangnya dana yang dikeluarkan akan melebihi

batas sehingga dana yang telah tersedia untuk perencanaan pembangunan akan berkurang.

#### 5. Utang Luar Negeri

salah satu hal yang paling penting yang dapat menghambat pembangunan nasional yakni hutang luar negeri, karena utang luar negeri bukanlah hal yang baru terjadi, namun dampak yang terjadi sangat serius dikarenakan utang luar negeri dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang yang akan menjadi beban sesaat untuk negara serta masyarakat.

Utang luar negeri juga dapat terjadi akibat kurangnya dana anggaran yang di butuhkan untuk perencanaan anggaran.

#### 6. Tingginya Tingkat Suku Bunga

dampak tingginya tingkat suku bunga dapat menghambat pembangunan nasional yakni apabila tingkat suku bunga tinggi, maka para masyarakat perilaku investor, konsumen dan pembisnis akan berkurang ketertarikannya untuk menanamkan modal di indonesia sehingga dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional tidak cukup.

### **4. Siklus Penyusunan Anggaran**

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi , anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran negara



merupakan rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama suatu periode tertentu.

Pengertian anggaran negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran ( suatu daur anggaran). Sedangkan dalam arti sempit, anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Siklus merupakan putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang-ulang dengan tetap dan teratur, sehingga siklus APBN dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran yang berulang dengan tetap dan teratur di setiap tahun anggarannya.

Menurut UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, siklus penyusunan anggaran tersebut di kemukakan sebagai berikut :

Pada tahap periode bulan Januari dilakukan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah, dengan arti penyiapan pokok-pokok asumsi dasar ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya akan di gunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal.

Kemudian pada tahap periode bulan Febuari s/d Maret dilakukan penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif. Pagu Indikatif adalah jumlah anggaran yang diberikan kepada kementrian negara dan lembaga sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Menteri/pemimpin lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan target prestasi yang hendak dicapai.

Selanjutnya pada tahap periode bulan Mei s/d Juli menteri/pemimpin lembaga melakukan pembahasan dengan komisi DPR mengenai rancangan anggaran, sesuai dengan pedoman dan menteri keuangan, dan hasilnya juga disampaikan kepada menteri keuangan. Pada tahap pertengahan bulan Agustus presiden melakukan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan RAPBN, dan pada periode pertengahan bulan Oktober dilaksanakan penetapan RUU APBN menjadi UU APBN.

Selanjutnya penetapan APBN dilakukan dua bulan sebelum awal tahun anggaran yang bersangkutan yakni paling lambat harus ditetapkan pada akhir bulan November agar dokumen pelaksanaan anggaran dapat diterbitkan tepat waktu dan pemerintah daerah mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun dan menetapkan APBD. Dalam membahas dan menetapkan anggaran, UU susunan dan kedudukan mengatur kewenangan panitia anggaran dan komisi-komisi pada lembaga legislatif.

pada akhir bulan tahun Bulan Desember dilakukan Penetapan dan Pengesahan DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ).

## **B. Analisis Prosedur Penyusunan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau.**

Kantor wilayah kementrian Agama Provinsi Riau menyusun anggaran untuk periode tahun berikutnya. Anggaran yang disusun tersebut dalam bentuk RKP ( Rencana Kerja Pemerintahan ). RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementrian/lembaga dalam bentuk kerangka reguliasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Penyusunan anggaran tersebut terdiri dari Input-Proses-Output. Input yang dimaksud merupakan data langsung yang berupa proposal yang menjadi dasar dalam penyusunan yang akan menghasilkan Output berupa anggaran yang akan disetujui oleh pemerintah. Sedangkan Proses tersebut disebut DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ) yang merupakan dasar bahwa kegiatan yang diusulkan oleh lembaga di biayai oleh pemerintah untuk tahun berikutnya. Namun kegiatan yang diusulkan oleh lembaga belum tentu dapat di terima oleh pemerintah.

Apabila hasil DIPA tersebut telah muncul pada bulan Desember, mengartikan bahwa pengusulan kegiatan tersebut telah sah dan disetujui oleh pemerintah dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan penelitian diatas yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran tentang permasalahan dalam perencanaan anggaran keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

#### A. Kesimpulan

1. Struktur organisasi dan pembagian tugas kepada pegawai dalam kantor tersebut belum di atur dengan baik karena pada setiap pegawai belum memiliki tugas tetap yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan jabatan.
2. Perencanaan keuangan sangat bermanfaat dikarenakan dapat merencanakan pengelolaan anggaran untuk masa kedepannya.
3. Beberapa pegawai kantor masih memiliki kekurangan dalam jam waktu kerja,serta hadir atau pulang tidak sesuai dengan jam waktu kantor tersebut

#### B. Saran

1. Kepala kantor harus lebih memperhatikan jam kerja para pegawai kantor sehingga para pegawai kantor dapat lebih disiplin serta tepat waktu dalam menjalankan tugas

2. Kantor wilayah kementerian agama provinsi riau dapat lebih berpedoman pada peraturan yang ditetapkan pemerintah yang berlaku secara umum
3. Kantor pembagian tugas serta wewenang pegawai sehingga dapat melaksanakan tugas sebaiknya lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan dalam lebih maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Drs. M. Arief Djamaluddin, Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Dr. M. Suparmoko, Ma, Keuangan Negara, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1990
- Yuswar Zainur Basri, Mulyadi Subri, Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Hutang Luar Negeri, Penerbit